

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Devi Afrilia¹, Evi Priyanti²

Devi Afrilia, deviafrilia1804@gmail.com, 082183301520, Universitas Singaperbangsa Karawang¹
Evi Priyanti, evi.priyanti@fisipunsika.ac.id, 085721713217, Universitas Singaperbangsa Karawang²

Abstract (English Version)

The progress of a village will not be separated from the success of a leader in leading the area. With the existence of a law on villages that gives authority to the village head to regulate his own area in accordance with local origins and customs. One of the ways to improve the welfare of its people is to organize a Development Program (KKB-PK) as a program issue of : How is the role of the village head in community empowerment through family planning programs. The theory used is the Role Theory According to Biddle and Thomas ; People who take in social interactions, Behaviors that arise in those interactions, Positions of people in behaving, and Relationships between people and behavior. The method used in this research is qualitative research, with interview data collection techniques, observation and documentation studies. This research was conducted in Pasir Tanjung Village, Karawang Regency. It can be concluded that the Family Planning Village Program (KB) is quite optimal, in terms of; the existence of supporting facilities for the development of the KB village by maximizing development facilities and infrastructure by building a pavilion as a meeting place for deliberation and can be used for posyandu activities.

Keywords: Village Head; Family Planning (KB); Empowerment

Abstrak (Indonesia Version)

Kemajuan sebuah desa tidak akan terlepas dari keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin daerahnya. Dengan adanya undang-undang tentang desa yang memberikan wewenang kepada kepala desa untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat. Salah satu cara yang dilakukan untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan menyelenggarakan program keluarga berencana merupakan program Pembangunan Keluarga (KKB-PK) sebagai program yang diselenggarakan untuk masyarakat. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang : Bagaimana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program KB. Teori yang digunakan adalah Teori Peran Menurut Biddle dan Thomas yaitu ; Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, Kedudukan orang-orang dalam berperilaku, dan Kaitan antar orang dan perilaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasir Tanjung

Kabupaten Karawang. Dapat disimpulkan bahwa Program Kampung Keluarga Berencana (KB) ini sudah cukup maksimal, ditinjau dari; Adanya fasilitas pendukung pembangunan kampung kb dengan memaksimalkan sarana dan prasarana pembangunan dengan membangun pendopo sebagai tempat perkumpulan musyawarah dan dapat digunakan untuk kegiatan posyandu.

Kata kunci: Kepala Desa; Keluarga Berencana (KB); Pemberdayaan

DOI : -

Received	:	
----------	---	--

Accepted	:	
----------	---	--

Published	:	
-----------	---	--

Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p>
------------------	---	--



1. LATAR BELAKANG

Kemajuan suatu desa tidak terlepas dari peran kepala desa dalam memimpin masyarakat. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Hak Pemerintah Desa, Kepala Desa berhak mengurus daerahnya sendiri menurut adat dan nenek moyang setempat, sehingga Kepala Desa dapat mengelola daerah dan masyarakat dengan lebih leluasa. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu lembaga nonkementerian yang memiliki misi untuk mewujudkan Nawacita Pembangunan 2015-2019 pemerintah melalui kependudukan yang menjadi agenda prioritas “Revolusi Karakter Nasional” pembangunan dan keluarga berencana. Untuk mencapai agenda prioritas tersebut, BKKBN harus mampu mengimplementasikan strategi pembangunan nasional dan memasukkannya ke dalam Rencana Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK). Salah satu cara kepala desa memberdayakan masyarakat adalah melalui keluarga berencana. Konsep Kampung KB merupakan implementasi mikro dari rencana komprehensif di tingkat (desa/kelurahan/dusun/RW). Isu pertumbuhan penduduk kini mulai menjadi isu inti dari seluruh aspek perencanaan pembangunan pemerintah daerah mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi. Salah satu faktor yang menyebabkan stagnansi rencana KK-BPK Indonesia saat ini adalah angka kelahiran total (Totally Fertility Rate/TFR) antara tahun 2002 dan 2012 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Menurut data, laju pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini 1,49%, atau 4,5 juta orang per tahun, atau setara dengan penduduk Singapura. Tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi tingkat pertumbuhan menjadi 1,1%. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK) saat ini sedang menurun, dan gaungnya tidak lagi sama seperti dulu, sehingga harus direvitalisasi kembali. Keluarga dan program pembangunan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Kampung KB merupakan salah satu terobosan yang dirancang khusus untuk mempromosikan proyek KKB-PK di tingkat desa. Kampung KB ini berusaha mengintegrasikan konsep pembangunan terpadu ke dalam bidang kependudukan. Kampung KB merupakan upaya menjadikan KKB-PK sebagai proyek yang diorganisir oleh masyarakat. Kampung KB berupaya memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan sehingga dapat memperoleh pelayanan KB yang komprehensif, serta berupaya mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam hal ini untuk menghasilkan data yang akurat. Peneliti menuliskan dan mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dari data-data yang mampu memberikan gambaran secara keseluruhan terkait mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi, dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan teori peran menurut Biddle dan Thomas dengan menganalisisnya menggunakan teori-teori terkait agar analisis lebih mendalam dan terperinci.

3. HASIL

3.1 Pengertian Teori Peran

Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2013:215). Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Menurut Biddle dan Thomas membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu; Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam berperilaku, serta kaitan antar orang dan perilaku.

3.2 Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh Bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa tidak hanya mengurus pemerintahan desa, memelihara ketertiban umum, dan mengembalikan hukum yang telah di langgar, tetapi juga ingin agar para pelanggar jukum tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan masyarakat yang berdamai benar-benar hidup dan bekerja dalam damai dan sejahtera. Kepala desa adalah penanggung jawab organisasi pemerintahan desa, dengan dukungan yang strategis dan tanggungjawab yang luas. Tanggung jawab meliputi tugas pekerjaan individu, yang di distribusikan di anantara pejabat pemerintah berdasarkan prinsip desentralisasi. Di desa, tanggung jawab tugas pelayanan dipusatkan pada kepala desa. Tanggung jawab urusan pekerjaan dapat dipikul oleh kepala desa sendiri atau oleh orang lain.

3.3 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Adisasmita, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efesien, seperti:

- a. Aspek masukan atau input (Sumber Daya Manusia (SDM), dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi)
- b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan)
- c. Aspek keluaran dan out put (pencapaian saran, efektivitas dan efisiensi)

Menurut Sumaryadi, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Ife (Martono, 2011) mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyrakat itu sendiri. Intinya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kekuatan dan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan dapat memaksimalkan potensinya tersebut.

3.4 Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

4. PEMBAHASAN

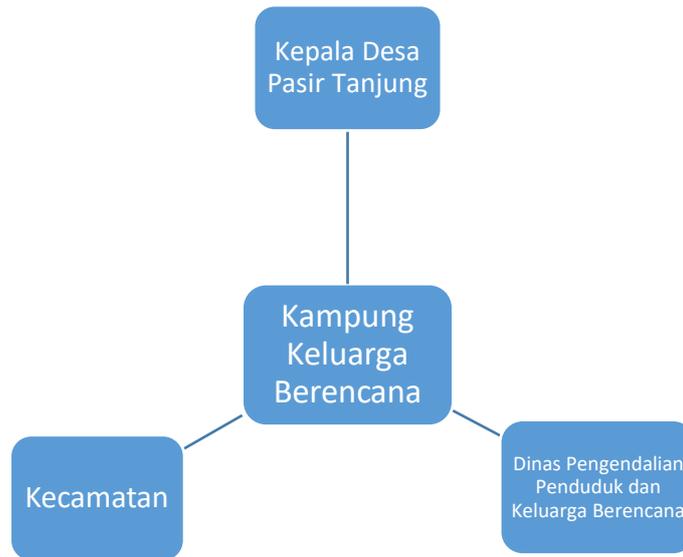
4.1 Teori Peran

Hasil Penelitian didasarkan pada teori menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), yang membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Pada struktur sosial tersebut juga terbangun hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya interaksi sosial disini dapat diartikan sebagai program Keluarga Berencana (KB) yang sedang dijalani di Desa Pasir Tanjung ini. Berdasarkan hasil penelitian kami di lapangan, kami menemukan bahwa adanya edukasi dengan kecamatan dan bekerja sama juga dengan pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB). Dalam hal ini, setiap bulannya diadakan rapat lalu di musyawarahkan di kampung kb nya per tiga bulan sekali.

Gambar 1.1
Alur Edukasi Kampung Keluarga Berencana (KB)



Sumber: Olahan Peneliti

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Perilaku yang muncul disini dapat kami artikan sebagai feedback atau respon serta antusiasme dari masyarakat dalam menjalani program Keluarga Berencana (KB) di Desa Pasir Tanjung. Setelah melalui beberapa tahapan wawancara, kami mengetahui bahwasannya untuk antusiasme masyarakat dapat dikatakan sudah cukup baik, karena semua mengapresiasi dengan dibentuknya Kampung Keluarga Berencana ini. Jika ada agenda atau terdapat kegiatan Kampung Keluarga Berencana, biasanya informasinya di tawarkan melalui pengeras suara yang ada di masjid agar masyarakat semuanya bisa datang ke lokasi. Untuk warga desa yang rumahnya jauh, Pak Lurah sudah menyediakan fasilitas berupa mobil antar jemput secara gratis (menjadi tanggung jawab Kepala Desa).

Tabel 2.1
Kegiatan Kampung Keluarga Berencana (KB)

Jenis Kegiatan	Pelaksanaan
<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Program Kampung KB Kegiatan Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang memberikan informasi terkait dengan program Kampung Keluarga Berencana. Kegiatan posyandu di Desa Pasir Tanjung dilakukan oleh bidan yang berada di Desa setempat.

Sumber: Olahan Peneliti

3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku

Kedudukan orang-orang dalam penelitian ini, bahwa tiap-tiap individu yang berwenang dalam program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Pasir Tanjung ini memiliki perannya masing-masing. Bapak Saepudin selaku Kepala Desa Pasir Tanjung memiliki keinginan memajukan desa pasir tanjung yang mana dulu merupakan desa tertinggal. Beliau beserta staff dan jajarannya melakukan sarana dan prasarana pembangunan yang juga di tahun 2018 itu merupakan program bupati yaitu di setiap desa harus memiliki kampung Keluarga Berencana yang melatar belakanginya untuk membangun kampung Keluarga Berencana (KB) ini dan membangun pendopo kampung kb ini di batas desa atau batas kecamatan dengan tujuan untuk memajukan desa baik jalan maupun program lainnya agar berjalan dengan baik. Lalu ada Bapak Acim selaku Ketua Kampung Keluarga Berencana (KB). Beliau sebagai Ketua mengharapkan dengan dibentuknya Kampung Keluarga Berencana (KB) ini agar masyarakat dapat sejahtera, dengan adanya kesejahteraan masyarakat diharapkan perekonomiannya pun dapat meningkat. Beliau juga sudah memiliki rencana untuk mengadakan koperasi simpan pinjam bagi masyarakat. Lalu yang terakhir adalah masyarakat. Kedudukan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat keberhasilan program ini ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Tabel 3.1
Sarana dan Prasarana Pembangunan Kampung KB

Pembangunan	Kegunaan
<ul style="list-style-type: none"> • Pendopo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendopo digunakan untuk kegiatan musyawarah Desa Pasir Tanjung mengenai agenda program Kampung KB. • Pendopo juga digunakan sebagai tempat untuk kegiatan Posyandu bagi balita.

Sumber: Olahan Peneliti

4. Kaitan antar orang dan perilaku

Objek kajian antar orang dan perilaku disini adalah Bapak Acim selaku Ketua Kampung Keluarga Berencana (KB), menjelaskan bahwa Kepala Desa sangat mendukung adanya program Kampung Keluarga Berencana ini, lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa telah terjalin kerjasama yang baik antar aparat Desa, semua ini dilakukan demi kebaikan, kemajuan, juga keberhasilan Desa Pasir Tanjung.

5. SIMPULAN

Simpulan

Sesuai dengan teori peran Biddle memiliki empat golongan yang menyangkut orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut,

kedudukan orang-orang dalam berperilaku, dan kaitan antar orang dan perilaku, peran Kepada Desa Pasir Tanjung dalam menjalankan program Keluarga Berencana dapat dikatakan cukup maksimal. Ditinjau dari; Adanya fasilitas pendukung pembangunan kampung kb dengan memaksimalkan sarana dan prasarana pembangunan dengan membangun pendopo sebagai tempat perkumpulan musyawarah dan dapat digunakan untuk kegiatan posyandu. Adapun yang terlibat langsung dalam gerakan program Keluarga Berencana tersebut antara lain Kepala Desa Pasir Tanjung, Ketua Bidang Keluarga Berencana Desa Pasir Tanjung, 1 Bidan Desa, Dinas PPKB, Bupati Karawang, seluruh Staff Desa, serta masyarakat setempat. Program Keluarga Berencana di Desa Pasir Tanjung yang dijalankan dari tahun 2018 ini berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Desa Pasir Tanjung terutama dalam hal kesejahteraan, selain dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, juga berpengaruh baik pada perekonomian masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa tujuan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Pasir Tanjung Kabupaten Karawang ini sudah cukup maksimal, karena yang menjadi tujuan awal yaitu, mensejahterakan masyarakat desa pasir tanjung.

Saran

Untuk mengoptimalkan program Keluarga Berencana tersebut, selain daripada fasilitas dari pihak Desa, juga perlu didukung dengan bantuan fasilitas dari pihak pusat dan dinas terkait terlepas dari bantuan edukasi program tersebut. Selain itu, perlu adanya tambahan tenaga ahli dalam hal ini bidan desa yang mana bisa dikatakan belum mencukupi apabila satu desa hanya terdapat satu bidan desa. Selain itu pihak terkait sebagai penggerak dalam program ini perlu terus mensosialisasikan terhadap masyarakat pentingnya program keluarga berencana ini dan mengupayakan strategi baru dalam menghadapi budaya masyarakat setempat yang mana masih ada yang kurang terbuka akan program tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Oemar, Soimin. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan :

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Website:

Radarkarawang (2020). Kampung KB Pasir Tanjung Diresmikan.

Retrieved from <https://radarkarawang.id/cilamaya/kampung-kb-pasirtanjung-diresmikan/>

Dejurnal.com (2020). Desa Pasir Tanjung Di Daulat Jadi Kampung KB.

Retrieved from <https://www.google.co.id/amp/s/www.dejurnal.com/2020/02/desa-pasir-tanjung-di-daulatjadi-kampung-kb/amp/>